

Pembahasan

LAPORAN BULAN November

Badan Pengarah Papua 2025

TEMA :

**Kolaborasi Pembangunan Menuju
Papua Mandiri, Adil dan Sejahtera**

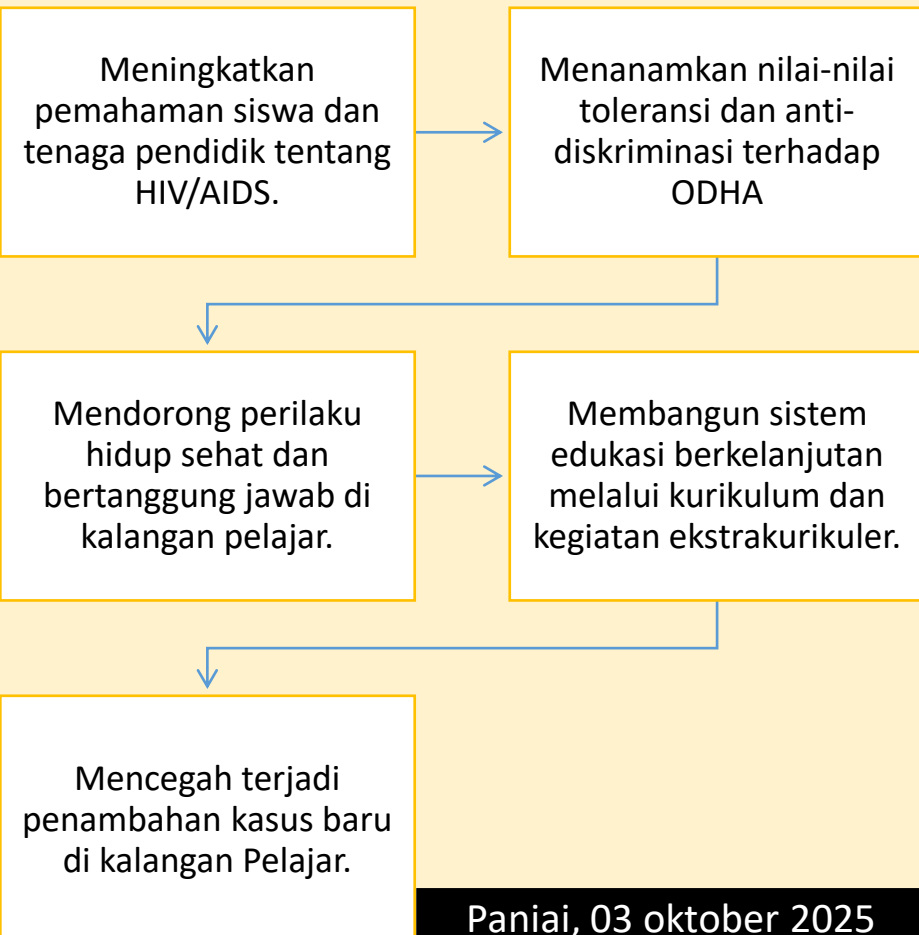
30 SEPTEMBER 2025



Pokja Papua Sehat melakukan Rapat SHEK bersama Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Ketua Komisi Penanggulangan HIV AIDS, Kepala Bidang Penyakit Menular Dinas Kesehatan Paniai, Para Kepala Sekolah SMP, SMA dan Ketua Perguruan Tinggi, di kabupaten paniai.

Tentang Penguatan Pendidikan HIV/AIDS Dari Dinas Kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS dengan Dinas Pendidikan melalui Sekolah di Kabupaten Paniai

Maksud dan Tujuan



Bentuk Kolaborasi

- **Penyusunan Modul Edukasi HIV/AIDS:** Modul disusun bersama oleh KPA dan Dinas Pendidikan, disesuaikan dengan jenjang pendidikan.
- **Pelatihan Guru:** Guru Bimbingan Konseling (BK) dan Pendidikan Jasmani (Penjas) dilatih untuk menjadi fasilitator edukasi HIV/AIDS di sekolah.
- **Sosialisasi di Sekolah:** Kegiatan penyuluhan dilakukan secara berkala di tingkat SMP dan SMA.
- **Pembentukan Duta Pelajar Peduli HIV/AIDS:** Siswa dilatih menjadi agen perubahan untuk menyebarkan informasi yang benar tentang HIV/AIDS.
- **Monitoring dan Evaluasi:** Dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas program dan perbaikan berkelanjutan.

Capaian Kegiatan

- Terlaksananya penyampaian materi kepada tenaga kesehatan, KPA dan Tenaga dari Dinas Pendidikan (Dinas pendidikan yang hadari oleh sedikit orang) di kabupaten Paniai.



Pokja Papua Damai menghadiri undangan HUT DPR Provinsi Tengah KE 01, Nabire 06/11/2025.



- Dewan Perwakilan Rakyat DPR Provinsi Papua Tengah merayakan HUT Ke-1 di Nabire, Kamis (6/11/2025).

"Sebagai bagian dari perwakilan rakyat Papua Tengah kita wajib bersyukur dengan menjadikan hari ulang tahun DPR PT yang pertama ini sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah ini dengan karya dan prestasi. Lalu kita bingkai catatan perjalanan hari ini dan ke depan. Dengan kerja-kerja produktif dan meraih cita-cita dan harapan akan masa depan yang lebih baik," kata Wakil Ketua II HUT jadi momentum memetik pembelajaran bahwa setiap generasi kepemimpinan memiliki warna dan dinamika tersendiri sesuai era dan samanya. "Kepada pendahulu dan para pendiri Provinsi Papua Tengah, dengan hormat kami menyampaikan terima kasih atas jasa pengabdian terbaiknya," katanya. Ia menegaskan bahwa salah satu fungsi yang merangkai DPR Papua Tengah adalah merangkai gagasan, menjadi kinerja, membangun irama kebersamaan, dan melakukan adaptasi serta regulasi dan birokrasi. "Dengan meningkatkan profesionalisme dan memaksimalkan kontribusi pembangunan daerah," pungkasnya.

Anggota BPP Melakukan Rapat Pleno bersama Wapres di Manokwari 07 November 2025

Hasil rapat pleno anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP), Wakil Presiden (Wapres), dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Manokwari pada bulan November 2025 adalah untuk membahas percepatan pembangunan di Papua Barat, termasuk bidang Trans Papua, produktivitas, dan pembangunan Orang Asli Papua (OAP). Rapat ini dilaksanakan di Aula Kasuari, Gedung Keuangan Negara Manokwari, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

Tujuan Rapat Pleno

Rapat pleno ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan mandat Otonomi Khusus (Otsus) Papua sesuai dengan arahan Presiden dan Wapres.

Poin-Poin Utama Rapat

Percepatan Pembangunan Papua: Arahan Presiden Prabowo untuk percepatan pembangunan di Papua menjadi fokus utama.

Sinergi Kebijakan: Penguatan sinergi kebijakan lintas sektor antara BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua.

Fokus pada OAP: Pembangunan yang merata dan berfokus pada Orang Asli Papua menjadi prioritas.

Peserta Rapat

Rapat ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Velix Vernando Wanggai, serta anggota Komite Eksekutif lainnya.

Penekanan Wapres

Wapres menekankan bahwa akselerasi pembangunan di Papua harus dua kali lipat dengan inovasi dalam perumusan kebijakan dan manfaat nyata bagi masyarakat. Pembangunan tidak boleh lagi Jawa-sentris, tetapi merata di seluruh wilayah Indonesia.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sendiri tidak secara eksplisit menjadi fokus utama dalam rapat tersebut, melainkan lebih kepada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan di Papua melalui BP3OKP dan komite eksekutif terkait.



Launching Sekolah Sepanjang Hari (SSH) Provinsi Papua Tengah di SD Negeri Inpres Nifasi 14 November 2025 (Pokja Papua Cerdas)

- Peluncuran Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) Provinsi Papua Tengah dilaksanakan di SD Negeri Inpres Nifasi pada 14 November 2025 oleh Pokja Papua Cerdas. Program ini merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.
- **Tujuan Program Sekolah Sepanjang Hari** Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) bertujuan untuk memberikan pendidikan yang lebih komprehensif kepada siswa, tidak hanya dalam bidang akademik tetapi juga dalam pembentukan karakter, kreativitas, dan keterampilan. Siswa akan berada di sekolah dari pagi hingga sore hari, mengikuti berbagai kegiatan yang dirancang untuk mendukung perkembangan holistik mereka.
- **Pelaksanaan Program**
- **Lokasi:** Program ini dipusatkan di SD Inpres Nifasi, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
- **Waktu:** Program ini mengharuskan siswa berada di sekolah dari pagi hingga sore. Jam pelajaran akan berlangsung hingga pukul 12.00 WIT, diikuti dengan kegiatan ekstrakurikuler.
- **Peluncuran:** Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, secara resmi meluncurkan program ini.
- **Pengembangan Program** Selain di Nabire, program SSH juga akan diterapkan di beberapa sekolah lain di delapan kabupaten di Papua Tengah, termasuk Mimika dan Paniai. Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga berencana membangun sekolah berpola asrama di delapan kabupaten setelah program SSH berjalan.
- **Dukungan Pemerintah dan Revitalisasi Pendidikan** Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menekankan dukungan terhadap revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran, yang sejalan dengan program SSH. Program ini diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua Tengah melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan



Anggota BPP menghadiri undangan Rapat tentang Tindaklanjut rekrutmen kelompok kerja BPP, 14 November 2025

Hasil Rapat yang dicapai

• Tujuan Rapat Tindak Lanjut Rekrutmen

- Rapat tindak lanjut rekrutmen kelompok kerja BPP kemungkinan besar diadakan untuk: **Evaluasi Proses Rekrutmen:** Menilai bagaimana proses rekrutmen telah berjalan, termasuk efektivitas metode yang digunakan dan respons dari para pelamar.
- **Analisis Hasil Rekrutmen:** Menganalisis hasil rekrutmen untuk melihat apakah jumlah pelamar yang memenuhi syarat sudah mencukupi, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
- **Penetapan Langkah Selanjutnya:** Menentukan langkah-langkah selanjutnya yang perlu diambil, seperti penjadwalan wawancara, tes kompetensi, atau tahapan seleksi lainnya.
- **Koordinasi Tim Rekrutmen:** Memastikan bahwa semua anggota tim rekrutmen memahami tugas dan tanggung jawab mereka, serta bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan rekrutmen.

• Agenda Rapat

- Agenda rapat tindak lanjut rekrutmen kelompok kerja BPP dapat mencakup beberapa poin berikut:
- **Laporan Progres:** Masing-masing anggota tim rekrutmen memberikan laporan mengenai progres yang telah dicapai dalam tahapan rekrutmen yang menjadi tanggung jawab mereka.
- **Identifikasi Masalah:** Mengidentifikasi masalah atau kendala yang dihadapi selama proses rekrutmen, serta mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut.
- **Pengambilan Keputusan:** Mengambil keputusan terkait langkah-langkah selanjutnya yang perlu diambil, seperti perubahan strategi rekrutmen, penyesuaian jadwal, atau penambahan sumber daya.

• Pentingnya Rapat Tindak Lanjut

- Rapat tindak lanjut rekrutmen ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses rekrutmen berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya rapat tindak lanjut, BPP dapat memastikan bahwa kelompok kerja yang terbentuk memiliki anggota yang kompeten dan berkualitas, sehingga dapat berkontribusi secara efektif dalam pembangunan di Papua.



Rapat FGD Penyusunan Rekomendasi atas temuan-temuan kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) Lingkup Provinsi Papua Tengah dalam rangka mendukung SHEK BPP/BP3OKP Provinsi Papua Tengah di timika pada tanggal 17 s.d 20 November 2025

Bidang kesehatan

1. Provinsi Papua Tengah merupakan daerah dengan angka HIV/AIDS paling tinggi di Tanah Papua, annual parasite index (API) yang signifikan, dan angka temuan infeksi TB paru yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Ketiganya menyumbang terhadap tingkat kematian penduduk dari tahun ke tahun, meskipun datanya secara definitive sulit didapatkan karena *monitoring* atau pemantauan terhadap para penderita sering terputus. Kasus-kasus baru masih terus ditemukan dengan angka yang fantastis. BP3OKP dapat menginisiasi upaya yang terintegrasi dengan pemerintah-pemerintah daerah untuk menekan laju pertambahan kasus baru HIV sebagai agenda bersama seluruh daerah; misalnya memasukkan materi HIV/AIDS sebagai bagian dari ekstrakurikulum di sekolah dengan memberdayakan guru-guru bekerja sama dengan para dokter, perawat, paramedis dari seluruh fasilitas kesehatan. Mendorong setiap pemerintah daerah untuk memaksimalkan penyediaan dan pendistribusian ARV bagi ODHA, juga apabila dimungkinkan melibatkan gereja-gereja untuk menyelenggarakan *pastoral care* bagi para ODHA. Upaya-upaya untuk destigmatisasi penderita AIDS sangat dibutuhkan agar mereka mendapatkan ruang kehidupan yang non-diskriminatif dan dapat menjalani hidup tanpa beban stigma social yang menekan. Berikutnya, manajemen program penuntasan TB paru sangat penting, termasuk dengan menetapkan target-target yang lebih besar supaya infeksi TB dapat ditekan. *Pertama*, penemuan kasus TB paru melalui *outreaching* terhadap seluruh populasi target sangat diperlukan. Meningkatnya angka pemeriksaan terhadap seluruh populasi akan memperbesar peluang untuk menemukan penderita TB paru yang belum tercakup dalam program pengobatan. Ini berarti juga menekan potensi penularan baru sekaligus menahan laju kematian akibat TB paru. *Kedua*, pelayanan pengobatan TB paru hendaknya dapat dilakukan di seluruh fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah maupun non-pemerintah, dan dapat diakses dengan mudah oleh penderita. *Ketiga*, manajemen data pelaksanaan program yang tersinkronisasi dan terpusat sampai di tingkat provinsi yang memudahkan pemantauan terhadap percepatan eradikasi TB paru di Papua Tengah sangat dibutuhkan. Perbaikan pada manajemen data akan menyakinkan para pihak terhadap laju percepatan pelayanan kesehatan.

Hasil Yang di Capai dan rekomendasi



Bidang Pendidikan

1. Pemerintah perlu **merevitalisasi SMA Kolese Pendidikan Guru Khas Papua** di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai strategi menyiapkan guru dari masyarakat orang asli Papua. Revitalisasi dilakukan dengan membentuk sebuah regulasi atau NSPK yang mengatur spektrum keberadaan KPG Khas Papua. Orientasi KPG Khas Papua ini adalah untuk jenjang pendidikan awal bagi calon-calon guru di Papua Tengah. BP3OKP perlu mengomunikasikan strategi ini sebagai bagian mengatasi problem kekurangan guru di sekolah-sekolah, terutama di wilayah sulit, kepada pemerintah daerah di Papua Tengah. Dalam visi yang lebih jauh, **pemerintah hendaknya mengupayakan strategi untuk melahirkan generasi guru-guru unggul dari kalangan orang asli Papua** dalam jumlah yang mencukupi sesuai dengan proyeksi kebutuhan beberapa tahun mendatang demi membangun pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Papua.
2. BP3OKP mendorong **pemerintah daerah dan provinsi untuk mengadopsi gagasan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terintegrasi BLK Komunitas, PKBM, LPT dan menyelenggarakan pendidikan vokasional bagi masyarakat luas**. Langkah ini penting untuk membuka akses terhadap layanan pendidikan untuk semua, dan untuk membangun kualitas sumber daya manusia Papua, secara lebih spesifik untuk mengurai persoalan pengangguran dan putus sekolah. Penyelenggaraan program vokasi ini bertujuan untuk mengurangi angka buta huruf, menuntaskan masalah putus sekolah, dan meningkatkan *life skills* warga. Penyelenggaraan pendidikan berdampak terhadap pembentukan kecakapan produktif warga sehingga dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif. SMK ini adalah jalan strategis untuk mengembangkan sumber daya manusia supaya dapat berpartisipasi dalam proses ekonomi masyarakat. Proses pembelajaran SMK ini didesain secara khas membantu menuntaskan persoalan pengangguran. **BP3OKP mendorong pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan macam ini bagi penduduk-penduduk secara berkelanjutan**. Selain itu, pemerintah hendaknya memberikan stimulus kepada para lulusan program ini, termasuk dalam hal ini membantu membukakan peluang-peluang pasar. Misalnya, dalam bisnis budidaya kopi arabika, SMK terintegrasi menyelenggarakan kelas singkat penyemaian dan pembibitan kopi. Produk bibit kopi dibeli oleh pemerintah untuk memasok kebutuhan bibit kopi di kebun milik BUMD, kebun petani, dll.

Rapat FGD Penyusunan Rekomendasi atas temuan-temuan kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) Lingkup Provinsi Papua Tengah dalam rangka mendukung SHEK BPP/BP3OKP Provinsi Papua Tengah di timika pada tanggal 17 s.d 20 November 2025

Papua Produktif

Hasil Yang di Capai dan rekomendasi

Papua damai

1. Sampai dengan sekarang ini perekonomian di Papua Tengah sebagian besar bergerak di sektor pertambangan, baik skala besar maupun skala pertambangan rakyat. Sektor yang lain, seperti perdagangan, transportasi, kesehatan, industri pengolahan, jasa, pertanian dan perkebunan, perhutanan, peternakan, perikanan, pengolahan hasil laut, dll. belum sungguh-sungguh berkembang. Padahal bidang-bidang perekonomian non-ekstraktif memiliki potensi yang besar untuk dieksplorasi. Oleh karena itu, BP3OKP berpandangan bahwa pemerintah mulai mengarahkan pengembangan industri pada bidang-bidang non-tambang, menggandeng pelaku ekonomi-ekonomi orang asli Papua, untuk terlibat. Pada permulaan, BP3OKP mendorong pemerintah untuk mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi non-tambang yang sangat terbuka bagi orang asli Papua. **Pemerintah perlu secara penuh komitmen menyiapkan calon-calon pelaku ekonomi dari pemuda-pemudi orang asli Papua.** Proses pendidikan ini dapat berjalan sebagai inkubasi bisnis. Hendaknya pemerintah menyelenggarakan "sekolah bisnis" terutama untuk para orang muda dengan latar belakang pendidikan menengah dan tinggi. Dalam hal ini, BP3OKP mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan program beasiswa yang spesifik untuk bidang relevan dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya hayati, kelestarian lingkungan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan peluang kerja yang tersedia di masa depan.
2. Perkembangan ekonomi wilayah dipengaruhi oleh besaran investasi yang masuk. Investasi pada sektor-sektor usaha akan membuka lapangan kerja dan peluang ekonomi yang lebih besar. Misalnya, investasi di industri pengolahan ikan berdampak pada kepastian pasar nelayan-nelayan sehingga mereka melaut; jumlah nelayan mungkin akan bertambah. Kemudian, orang-orang akan bekerja di perusahaan pengolah ikan. Bidang-bidang lain akan ikut berpengaruh. Oleh karena itu, **BP3OKP berpandangan bahwa pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi harus menciptakan kepastian hukum di daerah untuk investasi.** Kepastian ini akan sangat bernilai bagi para calon investor.

Selain investasi dari luar, pemerintah juga hendaknya membuka lapangan kerja dengan mendirikan usaha-usaha baru milik daerah di bawah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Antara lain, pemerintah dapat mendirikan usaha perbengkelan untuk melayani jasa servis kendaraan bermotor. **Pemerintah dapat memberikan pelatihan mekanik kepada pemuda-pemuda orang asli Papua untuk bekerja di Perusahaan-perusahaan pemerintah.** Pemerintah dapat juga **membuka BUMD bidang usaha peternakan** untuk memasok kebutuhan daging di wilayah Papua Tengah. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia para calon pebisnis, BP3OKP mendorong badan-badan otonomi khusus untuk mewajibkan perusahaan-perusahaan dan industri yang sudah maupun yang akan berinvestasi di wilayah Papua Tengah untuk mendukung pemberdayaan dan produktivitas ekonomi masyarakat adat dengan pola pendekatan pengembangan usaha mikro. Prakarsa ini dapat ditetapkan sebagai salah satu ketentuan tentang kewajiban pendirian inkubator bisnis untuk mendukung keberlanjutan industri dalam peraturan daerah, dan terdapat sebagai bagian proses perizinan investasi.



1. Untuk keperluan memantau progress pelaksanaan program-program dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial BP3OKP bersama dengan pemerintah perlu mendorong suatu model manajemen data terpadu yang mencakup seluruh kabupaten dan provinsi. Pengelolaan data yang demikian ini akan sangat membantu BP3OKP, pemerintah, untuk mengelola program-program percepatan pelayanan termasuk untuk *emergency response* yang tepat. Dengan cara ini juga pemerintah lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.
2. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, BP3OKP perlu mendiskusikan dengan pemerintah daerah dan provinsi untuk **percepatan pemenuhan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan, pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penyediaan sarana-sarana dan prasarana pembelajaran**; dalam visi yang sama BP3OKP mendorong pemerintah untuk **meningkatkan kualitas sumber daya guru dan tenaga kependidikan.** Pemenuhan kebutuhan guru di sekolah-sekolah hendaknya diselesaikan secara bertahap selambat-lambatnya dalam tiga tahun ke depan. Di samping itu, strategi yang lebih dalam untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Papua Tengah hendaknya menjadi salah satu pokok untuk dibahas secara bersama dalam kerangka besar untuk membentuk generasi masa depan Papua unggul tahun 2045.

Rapat Koordinasi BPP bersama Kepala Pajak Pratama Timika 18 November 2025

Hasil Rapat yang dicapai

- Rapat Koordinasi BPP bersama Kepala Pajak Pratama Timika pada 18 November 2025, berikut adalah informasi umum mengenai rapat koordinasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama:

Tujuan Rapat Koordinasi

- Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak.
- Menyamakan pemahaman terkait regulasi dan kebijakan perpajakan terbaru.
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan instansi lainnya.
- Mencari solusi atas permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pemungutan pajak.



Rapat tindak lanjut masalah batas wilayah adat suku kamoro dan mee di timika bersama suku kamoro 19/12/2025

Hasil capaian kegiatan

- Permasalahan Daerah perbatasan suku mimika wee/kamoro dan suku mee menurut keterangan suku kaamoro antara lain:
- Permasalahan hanya bertitik pada distrik kapiyara (pembatasan tanah adat kedua suku) menurut keterangan hasil keputusan 2 pihak melalui siding pengadilan bahwa penempatan perbatasan wilayah adat dari gereja katolik kapiyara 4 kilo ke desa magidagi disitu ditaruh letak perbatasan dengan ditandai batu dan dimana ada jalan disitu ada batas ditambah dengan batas-batas alam lain tanaman pinang dan buah merah, kepala kali kecil.
- Permintaan dari perwakilan suku mimika wee/kamoro agar dapat melakukan pertemuan dengan tokoh2 anak dan perwakilan masyarakat secara lengkap untuk membahas permasalahan tersebut diatas.
- Perwakilan dari suku mimika wee/kamoro akan menyerahkan kopian putusan pengadilan tentang permasalahan batas wilayah adat tersebut pada BP3OKP.



PEMBUKAAN PEMBAHASAN RAPERDASI DAN RAPERDASUS NO APBD INISIATIF DPRPT DAN EKSEKUTIF TAHUN 2025

Hasil Rapat yang dicapai



Pembukaan pembahasan Raperdasi (Rancangan Peraturan Daerah Provinsi) dan Raperdasus (Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Khusus) serta Raperda APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) inisiatif DPRPT (Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah) dan eksekutif pada tahun 2025 menandai langkah penting dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah serta regulasi khusus di tingkat provinsi.

Raperdasi dan Raperdasus

Raperdasi dan Raperdasus adalah instrumen hukum yang digunakan untuk mengatur berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat di tingkat provinsi. Raperdasus sendiri memiliki kekhususan karena mengatur hal-hal yang berkaitan dengan implementasi otonomi khusus di wilayah Papua, seperti yang disebutkan dalam berita mengenai penyerahan Raperdasi dan Raperdasus kepada DPRPT pada peringatan Hari Ulang Tahun Otonomi Khusus tahun 2025.

Raperda APBD

Raperda APBD adalah rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pembahasan Raperda APBD melibatkan proses yang ketat antara pihak eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD) untuk menyetujui alokasi anggaran untuk berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah.

Inisiatif DPRPT dan Eksekutif

Raperda dapat berasal dari inisiatif DPRPT maupun pihak eksekutif. Raperda inisiatif DPRPT menunjukkan peran aktif legislatif dalam merumuskan kebijakan daerah, sementara Raperda dari eksekutif biasanya berkaitan dengan program-program yang diusulkan oleh pemerintah daerah.

Proses Pembahasan

Pembahasan Raperda melibatkan beberapa tahapan, termasuk:

1. **Pengajuan Raperda:** Raperda diajukan oleh pihak eksekutif atau DPRPT.
2. **Pembahasan di DPRD:** Raperda dibahas oleh komisi-komisi di DPRD yang relevan.
3. **Penyampaian Pandangan Umum Fraksi:** Fraksi-fraksi di DPRD menyampaikan pandangan mereka terhadap Raperda.
4. **Jawaban Pemerintah Daerah:** Pemerintah daerah memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi.
5. **Persetujuan Bersama:** Jika Raperda disetujui oleh DPRD, maka dilakukan persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah.
6. **Pengundangan:** Raperda yang telah disetujui kemudian diundangkan dalam lembaran daerah.

Tujuan dan Manfaat

Pembahasan dan penetapan Raperda bertujuan untuk menciptakan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik. Dengan adanya Raperda yang baik, diharapkan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel, serta program-program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

PENUTUPAN PEMBAHASAN RAPERDASI DAN RAPERDASUS NO APBD INISIATIF DPRPT DAN EKSEKUTIF TAHUN 2025



Penutupan rapat pembahasan Raperdasi, Raperdasus, dan Raperda APBD inisiatif DPRPT dan eksekutif tahun 2025 menandakan selesainya serangkaian diskusi, evaluasi, dan negosiasi antara pihak legislatif (DPRPT) dan eksekutif (pemerintah daerah) terkait rancangan peraturan daerah tersebut.

Indikasi Penutupan Rapat

- Penutupan rapat ini umumnya mengindikasikan beberapa hal penting:
- **Kesepakatan Tercapai:** Semua atau sebagian besar pasal dan ayat dalam Raperda telah disetujui oleh kedua belah pihak.
- **Finalisasi Dokumen:** Rancangan peraturan daerah telah difinalisasi dan siap untuk tahap selanjutnya, yaitu persetujuan bersama.
- **Jadwal yang Ditentukan:** Proses pembahasan telah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- **Kemungkinan Hasil Rapat**
- Hasil dari penutupan rapat pembahasan ini dapat bervariasi, antara lain:
- **Persetujuan Raperda:** Jika semua pihak sepakat, Raperda dapat disetujui untuk kemudian diajukan ke tahap pengesahan.
- **Penundaan atau Revisi:** Jika terdapat perbedaan pendapat yang signifikan atau perlu adanya perbaikan lebih lanjut, pembahasan dapat ditunda atau Raperda dikembalikan untuk direvisi.
- **Persetujuan dengan Catatan:** Raperda disetujui dengan catatan atau rekomendasi tertentu yang harus diperhatikan oleh pihak eksekutif dalam implementasinya.

Tahapan Selanjutnya

- Setelah penutupan rapat pembahasan, tahapan selanjutnya meliputi:
1. **Penyampaian Laporan:** Hasil pembahasan Raperda disampaikan dalam rapat paripurna DPRPT.
 2. **Pengambilan Keputusan:** DPRPT mengambil keputusan mengenai persetujuan atau penolakan Raperda.
 3. **Persetujuan Bersama:** Jika disetujui oleh DPRPT, dilakukan persetujuan bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRPT.
 4. **Evaluasi oleh Pemerintah Pusat:** Raperda yang telah disetujui dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 5. **Pengundangan:** Setelah dievaluasi dan dinyatakan sesuai, Raperda diundangkan dalam lembaran daerah dan menjadi peraturan yang sah.
- **Implikasi bagi Daerah**
 - Penutupan rapat pembahasan dan persetujuan Raperda memiliki implikasi yang signifikan bagi daerah, antara lain:
 - **Landasan Hukum:** Memberikan landasan hukum yang jelas untuk pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
 - **Kepastian Anggaran:** Memberikan kepastian mengenai alokasi anggaran untuk berbagai sektor pembangunan.
 - **Peningkatan Pelayanan Publik:** Memungkinkan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui program-program yang didanai oleh anggaran daerah.
 - **Pembangunan Daerah:** Mendorong pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Rapat final terkait rekrutman kelompok kerja BPP, Jakarta 27/11/2025

PER-1/SETBPP/JYP/2025

1 Dasar Hukum & Tujuan

- Mengacu pada **Perpres No. 121/2022** dan **Peraturan Ketua BPP No. 01/2023**
- Dibentuk untuk mendukung percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua melalui **Kelompok Kerja (Pokja)** di bawah Sekretariat BPP

2 Prinsip Rekrutmen

- transparan;
- objektif;
- kompetitif;
- efisien dan efektif;
- bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme;
- tidak diskriminatif; dan
- tidak dipungut biaya

3 Tahapan Rekrutmen

- Perencanaan
- Pengumuman Rekrutmen
- Pelamaran
- Seleksi
- Pengumuman Hasil
- Pengangkatan Pokja BPP

4 Penyelenggara Rekrutmen

- Tim Seleksi** dibentuk oleh Sekretaris BPP
- Didukung oleh **Sekretariat Tim Seleksi**.

- Tim Seleksi terdiri atas:
- Perwakilan Kemendagri : Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
 - Perwakilan Bappenas : Direktorat Pembangunan Indonesia Timur
 - Perwakilan Kemenkeu : DJPK dan DJPb

CURRENT ISSUE

- Rekrutmen ini Adalah untuk Pokja yang berasal dari akademisi, profesional, dan/atau representasi Orang Asli Papua (Unsur Non ASN).
- Formasi **pokja** yang akan direkrut ditentukan berdasarkan beberapa aspek seperti evaluasi, kebutuhan, sarpras, dan anggaran.
- Fokus dari rekrutmen ini adalah melakukan pengisian anggota pokja sesuai komposisi ideal dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan pembedangan pokja
- Pengisian Formasi Koordinator Pokja pada masing-masing Pokja di seluruh Provinsi (Unsur ASN K/L dan menggunakan mekanisme yang berbeda dari prosedur rekrutmen ini)
- Proses perekrutan Pokja dilakukan melalui **open recruitment** yang melibatkan **Tim Seleksi** yang terdiri dari Kemenkeu, Kemendagri, Bappenas

Tahapan Rekrutmen

Seleksi Administrasi

Pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan pendaftaran anggota Pokja.

Seleksi Substansi

Penyusunan makalah dengan topik keterkaitan pelaksanaan pembangunan otonomi khusus sesuai pembedangan yang dipilih berdasarkan isu-isu regional pada masing-masing provinsi.

Profiling dan Screening dari BIN

Seleksi Wawancara

Meliputi pendalaman terkait makalah yang telah disusun dan kompetensi teknis lainnya sesuai pembedangan Pokja.



Tahapan	Tanggal
Pengumuman Rekrutmen Pokja	10-14 Desember 2025
Pendaftaran Rekrutmen Pokja	10-20 Desember 2025
Seleksi Administratif	10-30 Desember 2025
Pengumuman Hasil Seleksi Administratif	3-4 Januari 2026
Seleksi Substantif	5-9 Januari 2026
Pengumuman Hasil Seleksi Substansi dan Jadwal wawancara	17-18 Januari 2026
Seleksi Wawancara	19-23 Januari 2026
Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara	28 Januari 2025

TERIMA KASIH